

KEARIFAN LOKAL BISA MENYEJUKKAN LAMPUNG (PERSPEKTIF KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA)

Hasan Basri

ABSTRAK: Perspektif komunikasi lintas budaya dapat dipakai untuk menelaah sebuah konflik sosial yang berakar pada kesukuan dan adat istiadat. Perspektif ini lebih mengarah pada telaah yang memberi alternatif ketimbang pembenaran ataupun menyalahkan. Kemudian dari perspektif ini diupayakan mencari nilai-nilai potensial untuk pembenahan kehidupan sosial yang lebih baik, menyelesaikan konflik tanpa pertikaian, khususnya di Provinsi Lampung. Dalam perspektif itu, muncul sebuah tatanan nilai yang layak dipertimbangkan, yakni kearifan lokal yang tumbuh di Budaya Lampung. Daripadanya dapat ditumbuh-kembangkan nilai-nilai kemasyarakatan yang menjembatani aneka perbedaan sosial. Hal yang dibutuhkan adalah menggali lebih dalam nilai-nilai kearifan lokal tersebut dan menginternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : Konflik Sosial, Budaya Lampung, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Konflik kekerasan di Lampung Selatan tercatat menjadi lima kasus kekerasan yang paling mengerikan di Indonesia. Korban tewas mencapai 14 orang, belasan luka parah, dan 1.700 warga mengungsi.¹Konflik berlangsung tiga hari dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi dua kecamatan, yakni Kalianda dan Way Panji. Total kerugian mencapai Rp 24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar. Konflik ini memiliki 80.700 item pemberitaan di *Google Search* dengan kata kunci “Bentrok Lampung Selatan 28 Oktober 2012”.²Inilah realitas sosial yang mengharubirukan nilai kemanusiaan. Ini bukan prestasi tetapi sesuatu yang menyedihkan. Tidak hanya bagi republik ini, yang berfalsafah pancasila dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun juga bagi kemanusiaan dalam pengertian yang lebih luas. Adakah nilai kemanusiaan yang sesungguhnya, ketika satu kepentingan begitu mendominasi hingga kepentingan lain terhanguskan? Sudah begitu rapuhkah perekat sistem sosial kita hingga begitu mudah kekerasan membara?

Ada banyak alasan atas kejadian mengerikan itu. Namun tidak bermaksud membahasnya dalam konsep salah-benar juga tidak untuk pembenaran, kita justeru selayaknya menelaah makna apa yang dapat kita petik dari konflik ini. Daripadanya kita perlu menindak-lanjutnya agar potensi-potensi serupa cepat terdeteksi lalu cepat pula mencegahnya. Dalam perspektif ini, sudut pandang budaya dapat menjadi wacana dengan mengungkap nilai-nilai potensial yang layak untuk dikembangkan demi menjalin nilai-nilai kemanusiaan secara menegajawantah. Dalam Cole (2005) dinyatakan bahwa nilai-nilai adalah pemandu perilaku kita dan menjadikan siapa diri kita, sehingga untuk meraih sukses harus dimulai dari dalam diri. Untuk memulainya adalah memahami nilai-nilai, keyakinan dan pikiran.

Meskipun nilai-nilai tidak “benar” ataupun “salah”, kebanyakan kita berbuat seolah-oleh demikian! Padahal sering sulit untuk mengerti dan menerima “dari mana asal” seseorang dengan nilai-nilai yang sangat berlainan dengan nilai-nilai kita. Inilah sebabnya perbedaan nilai-nilai sering menimbulkan masalah dalam komunikasi dan konflik di antara orang-orang (Cole, 2005:11)

Seyogyanya, sebuah wacana tidak berhenti pada telahtentang nilai-nilai yang artinya menjadi tidak aplikatif. Ada baiknya jika nilai-nilai yang didalami dapat menawarkan langkah-langkah pemecahan (*solve*) yang dapat diterapkan sebagai kegiatan nyata, baik di lingkup

-
- 1 Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/10/29/mcmyot-bentrok-antarkampung-3-warga-tewas>[download tanggal 29 Desember 2012]
 - 2 Sumber: <http://news.liputan6.com/read/473537/isi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia> [download tanggal 29 Desember 2012]

hubungan antarpribadi maupun di lingkup yang lebih luas.

Sudat pandang ini mengarahkan tinjauan bukan berupa studi kasus, namun upaya analitis dalam perspektif kebudayaan di tataran lokal, kemudian daripadanya diharapkan pemecahan masalah, atau setidaknya identifikasi masalah yang boleh jadi merupakan solusi di masa datang. Pada situasi sekarang ini, tampaknya sebagai masyarakat kita diharapkan untuk menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk dikembangkan untuk kemaslahatan bersama. Pendekatan yang boleh dikata sesuai adalah dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal untuk lebih diperkenalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menggali Kearifan Lokal

Alhamdulillah, konflik yang dipaparkan di muka tidak meluas. Ini adalah pelajaran mahal tentang konflik horizontal di Lampung yang potensial ada, terlebih jika melihat karakteristik masyarakat Lampung yang terdiri atas beragam *sub-culture* atau etnis bangsa yang jadi penyangga program transmigrasi sejak zaman kolonial hingga masa orde baru. Transmigrasi yang dulunya dikenal dengan kolonisasi mewarnai perkembangan wilayah Lampung. Pada awalnya konsep transmigrasi sebagai pemindahan penduduk secara sistematis oleh kolonial Belanda bermotif politik (misalkan “membuang” para pengikut Perang Diponegoro ke Tondano, Sulawesi, disana mereka dan keturunannya berkembang dan membentuk masyarakat yang membaur). Juga ada karena motif ekonomis (misalkan alasan tenaga kerja “kuli kontrak” untuk perkebunan –*onderneming*-- dari Jawa ke Suriname dan Deli Serdang). Sebagai orang Jawa yang bermigrasi dalam jumlah besar, adat istiadat dan identitas kejawaan mereka tetap terpelihara walaupun akulturasi dengan etnik lain telah terjadi secara luas.

Menurut Sudjarwo, Direktur Pascasarjana Universitas Lampung,³ hal inilah yang membedakan akulturasi budaya masyarakat transmigrasi di Lampung dengan daerah lainnya.

Daerah seperti di atas hampir tidak terdengar ada konflik antara mereka dan penduduk tempatan. Justru yang terjadi

adalah akulturasi budaya yang berkembang pelan tetapi pasti. Berbeda dengan daerah kolonisasi yang dirancang memang berbeda oleh Belanda. Ironisnya, kebijakan itu dilanjutkan dengan program transmigrasi pada awalnya. Proses akulturasi sering terkendala karena pola permukiman yang *enklave*, sehingga proses sosial tidak dapat berjalan secara alami. Kemudian dipicu juga dengan pemberian fasilitas yang sering menimbulkan rasa tidak adil bagi masyarakat tempatan. Tidak terkecuali di Lampung, jika kita lihat dari penempatan kolonisasi Gedongtataan, Kotaagung, Metro, Lampung Tengah, Sukadana, ternyata permukiman kolonisasi yang dilanjutkan dengan transmigrasi memiliki desa tersendiri dan diberi fasilitas tersendiri pula. Alasan pembenaran pada waktu itu ialah agar mempercepat penyesuaian diri dengan lingkungan, maka diberi dukungan sosial dan finansial sehingga para kolonis/transmigran tidak lari meninggalkan tempat.

Bahwa ada perbedaan secara sosial memang merupakan warisan buruk dari zaman kolonial Belanda. Boleh jadi, perbedaan perlakuan sosial itu pada gilirannya akan mencuat menjadi konflik horizontal. Jika melihat konflik yang disampaikan di muka, nuansa ini kentara dimana yang terlibat bentrok berasal dari etnis Bali dan etnis Lampung. Dua etnis yang membaur selama ini sebagai hasil dari proses kolonisasi yang berikutnya dikenal dengan transmigrasi. Namun, sekali lagi, konteks tulisan ini bukan pada perbedaan etnis yang mencuat menjadi konflik berdarah (Sesungguhnya, dimanapun di negeri ini selalu ada perbedaan yang potensial menjadi konflik). Adapun hal yang dapat dipetik disini adalah, dalam proses akulturasi yang dinamis ini perlu ada suntikan-suntikan baru agar dinamika yang terjadi tidak menggerus perkembangan dan pembangunan, namun sebaliknya menjadi perekat bagi proses akulturasi budaya-budaya yang ada di masyarakat. Menurut Andi Achmad⁴:

“Dalam kehidupan bermasyarakat mereka

3 Dikutip dari Artikel dalam Harian Lampung Post, edisi Jum’at, Tanggal 23 November 2012.

4 Andy Achmad Sampurna Jaya adalah Mantan Bupati Lampung Tengah. Kutipan diambil dari Artikel pada HarianLampung Post, edisi Senin, 19 November 2012

dapat bekerja sama dalam semua hal walaupun ada perbedaan etnis, budaya, dan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat Lampung merupakan tempat perpindahan penduduk pendatang, khususnya suku Jawa, dari sejak era kolonisasi pertama zaman Belanda, antara lain di Gedongtataan dan Lampung Tengah (Metro), demikian pula disusul oleh suku-suku lain, seperti suku Bali, Palembang, Batak, Minang, dan lain-lain. Penduduk Lampung sangat heterogen dan karena itu Lampung disebut-sebut sebagai miniatur Indonesia. Hal ini tentunya bukanlah sesuatu yang mudah dalam menyikapi dan menjaga keutuhan bersama dalam bentuk kesatuan dan persatuan.”

Untuk itu, diperlukan upaya untuk menggali nilai-nilai yang mampu menjadi perekat hubungan sosial dalam konteks akulturasi antarbudaya. Potensi yang paling mengena dalam akulturasi yang mampu meminimalisir konflik adalah dengan menggali kearifan-kearifan lokal yang ada di Lampung. Kearifan lokal diyakini mampu menjadi nilai yang dapat diaplikasikan bersama di masyarakat, pun dapat diaplikasikan di Lampung. Mengenai kearifan lokal di Lampung ini Fachrudin M. Dani, peneliti pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung⁵, menyebutkan tentang nilai-nilai kearifan lokal di Lampung yang telah menjadi acuan perilaku secara tradisional pada masyarakat asli Lampung; yakni falsafah *piil pesenggiri*. Falsafah ini secara historis merupakan kearifan lokal yang sangat potensial dalam kerangka akultuasi budaya.

Pengertian *piil pesenggiri* sesungguhnya merupakan pola perilaku dalam adat istiadat atau budaya asli Lampung.

Kearifan tradisional daerah Lampung adalah konsep matang tentang proses akulturasi dengan dasar persamaan dan kesetaraan antara satu dengan yang lain. Dengan bermodalkan nilai-nilai kesetaraan dalam *piil pesenggiri* maka akan banyak hal yang dapat diselesaikan dengan cara yang proporsional. Bukan penyelesaian dengan cara mengorbankan ketidakberdayaan seseorang atau kelompok serta kesewenangan orang atau kelompok lain.⁶

Fachrudin M. Dani, lebih jauh menyebutkan tentang falsafah *piil pesenggiri* yang memiliki nilai-nilai budaya kuat manakala pergaulan antarbudaya atau katakanlah akulturasi menjadi suatu keseharian dalam bermasyarakat. Yang pertama adalah *nemui nyimah*, terdiri dari dua kata yaitu *nemui* yang artinya tamu dan *nyimah* yang berasal dari kata *simah* yang artinya santun. Falsafah tamu atau pertemuan menjadi penting artinya dalam tata hubungan masyarakat, karena aktivitas pertemuan atau pertemuan pada umumnya adalah bertemunya dua atau bahkan berbagai (banyak) kepentingan untuk mencari suatu titik sentuh yaitu kepentingan bersama, itulah sebabnya kata *nemui* atau tamu disandingkan dengan *simah* yang artinya santun. Karena ketercapaian kesepakatan dari aktivitas pembicaraan dalam sebuah pertemuan atau pertamuan adalah kesantunan. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pihak hanya akan dicapai dengan kesantunan yang terpateri pada semua pihak. Kesepakatan itu juga hanya akan dicapai setelah masing-masing pihak mau mengesampingkan berbagai kepentingan pribadi maupun golongan. Kesantunan dan semangat kebersamaan akan menyelesaikan konflik yang terjadi antar-pihak, terlebih jika kesantunan dan kebersamaan itu diaplikasikan secara nyata oleh para pihak yang setara.

Adapun mengenai nilai kesetaraan dapat disimak pada unsur *piil pesenggiri* yang kedua, yaitu *nengah nyappur*. Terdiri dari dua kata yaitu kata *nengah* yang berarti bersaing atau bertanding. Kemudian kata kedua: *nyappur* artinya tenggang rasa. Kata *nengah* yang sebenarnya memiliki tiga arti, yaitu kerja keras, berketerampilan dan bertanding. Maknanya menunjukkan bahwa sebenarnya setiap seseorang dalam menyelesaikan permasalahan harus tetap dijamin hak-haknya sebagai sebuah insan. Orang yang bekerja keras, umpamanya, berhak untuk mendapatkan hasil yang banyak, orang yang memiliki keterampilan akan berhak menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan orang yang pilih tanding akan berhak mendapatkan kemenangan. Pada prakteknya pelaksanaan kesetaraan ini dalam rasa toleransi yang tinggi, artinya mendapatkan hasil yang sebanyak banyaknya, menghasilkan yang terbaik dengan keterampilan yang dimiliki untuk kesenangan dan kegembira-

5 Dapat dilihat pada blog

6 *ibid*

raan banyak orang (publik) dan prestasi tinggi atau kemenangan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan bersama. Dengan demikian, *nenгах nyappur* pada essensinya adalah bukan saling mengalahkan, tetapi adalah justeru memupuk semangat kesetaraan.

Nilai Kebersamaan, tergambar dalam unsur *piil pesenggiri* yang disebut *sakai sambaian*. Terdiri atas dua kata, *sakai* yang berasal dari kata *kakai*, *kekai* atau *akai*, yang artinya buka, terbuka atau keterbukaan. Kata *sambaian* berasal dari kata *sambai* atau *sumbai* yang artinya pelihara. Sikap terbuka ini menunjukkan keharusan seseorang untuk siap dikoreksi, tetapi dilain pihak juga berarti para pihak dalam waktu bersamaan menghendaki harus sikap memelihara. Makna koreksi dalam hal ini bukan berarti keharusan mengikuti keinginan salah satu pihak kepada pihak yang lain (memaksakan kehendak), tetapi lebih ditujukan sebagai upaya memelihara hal-hal yang sudah semestinya. Dengan kata lain melaksanakan keniscayaan-keniscayaan yang harus dilaksanakan, berarti upaya-upaya para pihak untuk mencari kebenaran dan bersepakat melaksanakan kebenaran itu dalam praktek kehidupan. Bahkan jika koreksi kebenaran itu menjadi sesuatu yang dianggap baru, atau diluar keinginan para pihak sebelumnya. Bila memang kesepakatan tumbuh dan hasil yang terpelihara berdasarkan titik temu para pihak tersebut.

Dalam *piil pesenggiri* juga terkandung nilai pembaharuan, yakni pada unsur *juluk adek*. Baik kata *juluk* maupun kata *adek* menunjukkan keharusan akan adanya pembaharuan-pembaharuan. Kata *juluk* maupun kata *adek* adalah merupakan nama baru, nama baru yang diberikan kepada seseorang yang mencapai prestasi baru. Pembaharuan juga adalah merupakan alternatif manakala konflik terhadap hal-hal tertentu sulit dicarikan jalan keluarnya. Kemudian akan menjadi lebih sulit manakala pihak-pihak dipaksakan untuk memilih salah satu opsi dari dua pihak (atau lebih) yang mengalami konflik. Pembaharuan merupakan alternatif cerdas bagi jalan buntu yang dialami dalam sebuah perundingan, oleh karenanya dua pihak harus mencari alternatif lain yang merupakan *win-win solution*, dimana para pihak tidak merasa dikalahkan karena adanya alternatif baru.

Selain *piil pesenggiri* sebagai tatanan adat Lampung yang dapat kita lestarikan se-

bagai kearifan lokal nan potensial sebagai *asset* pembangunan sosial di daerah Lampung, terdapat pula kearifan lokal yang disebut *titi gemeti*.⁷Sesungguhnya konsepsi *titi gemeti* adalah kelanjutan atau keniscayaan dari *piil pesenggiri*. Kalau *piil pesenggiri* adalah nilai filosofisnya, maka *titi gemeti* adalah petunjuk operasionalnya. *Titi gemeti* adalah merupakan tata titi, tata cara serta tata aturan berupa semacam perangkat yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan *piil pesenggiri*. Manakala kesenjangan atau *gap* masih belum atau sulit terselesaikan oleh *piil pesenggiri* maka *titi gemeti* adalah petunjuk cara penyelesaiannya. *Titi* disini dapat diartikan adalah jembatan atau tangga yang akan memiliki kemampuan menjembatani berbagai perbedaan. Kalau *titi* diartikan jembatan, berarti dia berfungsi menghubungkan antara dua wilayah yang terpisah oleh sungai atau jurang. Manakala *titi* diartikan alat untuk meniti atau menapaki tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah (tangga), maka *titi gemeti* adalah alat untuk mempertemukan dua posisi yang berbeda (tinggi dan rendah). Melalui *titi gemeti* maka konflik pada masa lalu dapat diselesaikan dengan tuntas. Penyelesaian dengan cara *titi gemeti* pada masa lalu dapat diselesaikan dengan simpul akhir merupakan seabait pantun, seabait sair, seabait kata bijak, dan itupun melahirkan kepuasan bagi mereka yang mengalami konflik. Pada dimensi ini nilai seni dalam budaya Lampung mengemukan, bahwa pantun sebagai manifestasi seni tradisional sejak zaman dahulu telah memiliki kemampuan untuk membuka dan menggugah hati para pihak yang mengalami konflik.

Selain berdimensi seni, falsafah *piil pesenggiri* memberi makna egaliter pada adat istiadat masyarakat Lampung. Egaliter bermakna sederajat, ini berarti dalam adat Lampung tidak mengenal kepatuhan berdasarkan *level* atau strata masyarakat. Masyarakatnya berada dalam derajat yang sama, tidak mengenal masyarakat biasa dan masyarakat ningrat karena garis keturunan. Misalnya perbedaan dalam berbahasa Lampung yang tidak mengenal derajat dalam penggunaan kosa kata, jika diband-

7 Dapat dilihat pada situs komunitas Lampung [[http://ulunlampung.blogspot.com/search/label/masalah %20sosial](http://ulunlampung.blogspot.com/search/label/masalah%20sosial)] dan; <http://www.seruit.com/index.php/budaya>.

inginkan dengan kesantunan bahasa Jawa dalam bahasa *kromo inggil* yang diperuntukan bagi lawan bicara yang dianggap berderajat lebih tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Lampung tidak dikenal pelapisan sosial berdasarkan derajat keningratan dari garis keturunan. Konsep egaliter tersebut diperkuat dengan perjalanan historis masyarakat Lampung yang tidak dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Itulah sebabnya maka dalam falsafahnya ditekankan untuk lebih menghayati nilai untuk saling menghormati (*nemui nyimah*), kesetaraan (*nengah nyappur*), kebersamaan (*sakai sambaian*) dan juga pembaharuan (*juluk adek*). Ditambah lagi dengan *tata-titi*, sebagai petunjuk pelaksanaan dari *piil pesenggiri* dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat egaliter terdapat peluang konflik lebih besar, karena masing-masing tidak ada paksaan atau keharusan patuh kepada yang lain. Kesamaan derajat yang menimbulkan kepatuhan lebih dikarenakan oleh berbagai faktor kesamaan, atau ada kepentingan yang lebih besar. Kesetaraan memberi peluang semua pihak untuk menguatkan diri dalam kesejajaran. Peluang semua pihak atau semua unsur masyarakat adalah sama dalam kehidupan bermasyarakat. Ada sisi baiknya, bahwa ketika banyak masyarakat pendatang membaaur, egaliterianisme masyarakat Lampung memberi keuntungan bagi perkembangan masyarakat. Yaitu sifat kesediaan menerima sesuatu yang datang dari luar dengan pengertian kesetaraan atau sederajat antara sesama bagian dari masyarakat. Kebersediaan ini mempunyai pengaruh positif dalam konteks mereka akan mendapat sesuatu yang lebih baik atas sesuatu yang datang itu, kemudian pada gilirannya akan memberikan akulturasi dalam sinergi menuju kemajuan masyarakat.

Sesuatu yang datang, atau sesuatu yang baru, dalam masyarakat egaliter dipandang bukan ancaman. Keterbukaan yang dimiliki masyarakat egaliter berdasarkan sifat bahwa kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang sederajat, menjadikan masyarakat egaliter lebih mudah menerima perubahan di masyarakatnya. Termasuk dengan diterimanya para pendatang yang menjadi bagian dari masyarakatnya.

Mengejawantahkan Kearifan Lokal

Kembali kepada *piil pesenggiri* sebagai

kearifan tradisional, dapat kita lihat bahwa sesungguhnya yang terkandung adalah nilai-nilai tradisional yang bernilai universal. Misalkan nilai-nilai demokrasi, kemandirian, dan toleransi, hal mana tergambar dalam *nemui nyimah* (kehormatan), *nengah nyappur* (kesetaraan), *sakai sambaian* (kebersamaan) dan *juluk adek* (pembaharuan). Maksudnya, dalam nilai-nilai tersebut sesungguhnya terdapat nilai-nilai kemasyarakatan yang sifatnya universal. Nilai universal dapat dipahami dan diterima sebagai hal yang umum pada masyarakat dianapun. Misalnya *nengah nyappur* bermakna kesetaraan, merupakan sesuatu yang mendasari munculnya pengakuan atas hak asasi manusia yang berlaku universal.

Universalitas dalam kearifan lokal ini memberikan peluang kepada siapapun untuk mempelajari, menaati sekaligus memperaktekannya. Sudah saatnya masyarakat Lampung menawarkan (lebih jauh lagi: mempopulerkan) kearifan lokal yang khas ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Lampung. Ini berarti bukan hanya bagi generasi muda masyarakat asli Lampung (yang boleh jadi mengalami pergeseran budaya atas adat istiadat mereka sendiri) tetapi yang terpenting adalah bagi masyarakat pendatang di Lampung. Implikasinya, bagi semua unsur ataupun kelompok masyarakat yang ada di Lampung hendaknya mempelajarinya, bisa berarti masyarakat Lampung yang berasal-usul dari Jawa, Bali, Banten ataupun Keturunan Tiongkok.

Upaya mendalami makna *piil pesenggiri* sebagai kearifan lokal yang sangat layak untuk ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan karena nilai universalitas dalam *piil pesenggiri* yang jika dipahami sebagai "paket" yang lengkap akan memperkaya kehidupan bermasyarakat. Aktualisasi *piil pesenggiri* ini yang tampaknya perlu kembali digali, diperkenalkan (dan dipopulerkan) kepada semua pihak yang ada di Lampung. Mengingat bahwa hal ini mengandung nilai-nilai universal, maka yang diperlukan adalah pendalamalaman atas "paket" tersebut. Jangan hanya hal-hal yang mencirikan kedaerahan (sebagai adat-istiadat semata) namun dalam kajian yang lebih meluas; bahwa jika semua memahami dan menganutnya akan tercapai kesepakatan yang sama; tidak memahami kearifan lokal ini secara selintas atau hanya sebagian saja.

Dapat dilihat pemaparan tentang *piil pesenggiri* yang memiliki sembilan nilai (Suwondo: 1977, dalam Mardihartono, 2013:89-90) yang menyebutkan:

Pertama, *prestise*, yakni konsep kehormatan yang tinggi berdasar harga diri yang dimiliki karena keutamaannya.

Kedua, prestasi, yakni keutamaan yang diperoleh karena apa yang didapatkan berdasarkan pencapaian atas hal-hal yang diusahakan dengan jalan baik dan benar.

Ketiga, kehormatan diri, yakni keutamaan yang diperoleh seseorang di tengah masyarakat sehingga memiliki harga diri karena kelebihan atau keutamaan pribadinya dalam bergaul dalam masyarakat dan tidak sombong atas orang lain.

Keempat, menghormati tamu, yakni prinsip menghargai orang lain yang seringkali dikaitkan dengan tamu atau orang yang baru datang sebagai pendatang atau sebagai "orang bukan asli" dalam masyarakat saibatin atau masyarakat Lampung pada umumnya.

Kelima, kerjakeras, yakni masyarakat Lampung harus berprinsip selalau bekerja keras dalam setiap usahanya. Tidak boleh mengutamakan hasil yang segera atau instan, tetapi jerih payah itulah yang akan dinilai oleh masyarakat Lampung.

Keenam, kerja sama, yakni prinsip melakukan kebersamaan dalam masyarakat, baik sesama masyarakat Lampung atau dengan masyarakat lain. Kerja sama menjadi dasar untuk membangun masyarakat dan bangsa sehingga sebuah masyarakat akan maju atau berkembang dengan adanya kerjasama yang dikerjakan.

Ketujuh, produksi, yakni prinsip produksi merupakan prinsip untuk menutamakan, menghasilkan, atau memproduksi sesuatu daripada mengkonsumsi dari masyarakat lain.

Kedelapan, persamaan dan daya saing, yakni prinsip persamaan merupakan prinsip yang mendasari perlunya cara pandang bahwa dalam masyarakat kita semua adalah sama karena itu harus

saling menghargai, menghormati, dan meneladani atas masyarakat siapapun mereka. Dari persamaan yang dikembangkan akan menumbuhkan persaingan yang sehat bukan persaingan yang kotor, sebab persaingan sehat merupakan dasar untuk pertumbuhan dalam kebersamaan dalam masyarakat.

Kesembilan, keuntungan, yakni prinsip ini merupakan prinsip yang merupakan hasil dari apa yang diusahakan di dalam masyarakat dengan kerja keras, jujur, adil persamaan, menghargai sehingga menjadi keuntungan masyarakat.

Masih menurut Mardihartono (2013), dalam masyarakat Lampung sekarang ini pemahaman dan aplikasi nilai-nilai kearifan lokal *piil pesenggiri* kurang menyentuh hal yang substansial dan pada posisi yang benar (Mardihartono, 2013: 92). Boleh jadi, telah terjadi pendangkalan makna terhadap kekayaan nilai pada kearifan lokal tersebut.

Piil pesenggiri ini diterjemahkan sangat sempit, sehingga *piil pesenggiri* itu hanya harga diri yang tak jarang berhubungan dengan konflik fisik. Mestinya tidak demikian. Konflik harusnya tidak akan terjadi karena kita mempunyai harga diri dan martabat. Kalau kita konflik yang mengorbankan orang lain apalagi masyarakat luas, sebenarnya kita itu tidak punya harga diri. (dari kutipan wawancara Wan Mauli Tuan Raja Tihang, dalam Mardihartono, 2013:91-91)

Sesungguhnya, pendekatan aplikatif atas kearifan lokal seperti nilai-nilai dalam konsepsi *piil pesenggiri* menghendaki aktualisasi pemahaman yang komprehensif tentang kearifan lokal. Sebagai upaya awal, beberapa langkah dapat dilakukan:

1. Menggali hal-hal yang baku dari kearifan lokal ini. Diperlukan inventarisasi nilai-nilai yang komprehensif, sehingga tercipta suatu dokumen baku tentang kearifan lokal ini. Jika memang telah ada, perlu dilakukan perbanyakannya untuk segera menjadi bahan internalisasi dalam upaya mempopulerkannya.
2. Menyebarkan tatanan nilai ini sebagai suatu kearifan lokal yang "harus" dipelajari bagi siapapun yang bermasyarakat di Lampung. Dengan "keharusan" tersebut di-

- harapkan paham secara komprehensif atas nilai-nilai yang menjadi patokan perilaku, sehingga ketika ada peluang konflik, akan merujuk pada tatanan yang dipahami bersama.
3. Menginternalisasi melalui pendidikan formal. Sudah saatnya muatan lokal pendidikan di Lampung untuk mengadaptasikan kearifan lokal ini sebagai mata pelajaran di sekolah. Hal-hal yang dipelajari di sekolah diharapkan mampu menjadi bekal dalam kehidupan anak didik di masyarakat. *Point* penting yang ditekankan disini adalah pendidikan ini adalah pendidikan penanaman *value* dan bukan mengejar kompetensi pelajaran (seperti keterampilan berbahasa daerah Lampung), tetapi lebih jauh sebagai pendidikan budi pekerti dalam konteks muatan lokal. Ini berarti selain mengembangkan kompetensi anak didik juga menghendaki kompetensi yang optimal dari guru atau pengajarnya. Diperlukan pembekalan yang memadai tentang muatan lokal ini sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengapresiasi *value* dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
 4. Yang juga penting adalah: peran pemerintah (khususnya Pemerintah Daerah Lampung) untuk memfasilitasi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk kemandirian lembaga adat serta aktualisasi *piil pesenggiri*. Untuk *point* terakhir ini dapat dilihat adanya ketidakberdayaan lembaga adat dalam kaitannya dengan diberlakukannya Undang-undang Pemerintahan Desa (UU No.32 Tahun 2004). Dalam peraturan tersebut peran pemerintahan dalam kehidupan masyarakat “dikuasai” oleh lembaga pemerintahan desa. Lembaga adat yang berperan dalam konteks kearifan lokal berlandaskan adat istiadat menjadi tidak berkewenangan secara hukum. Sesungguhnya adat merupakan kekuatan yang mengikat masyarakat, terutama di lingkup desa, sebagaimana dikatakan Boeke (1970) bahwa adat merupakan kekuatan hukum pribumi dalam lingkup tertentu. Persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional. (Boeke, 1971, dalam Wasistiono, 2007:14) Ini berarti kekuatan adat istiadat merupakan potensi yang seyogyanya diperhatikan dalam

pembangunan sosial di desa (yang seyogyanya juga selaras dengan pembangunan fisik). Dalam konteks masyarakat Lampung dimana memiliki potensi konflik cukup besar, maka keberadaan adat istiadat serta nilai-nilai yang dapat diaplikasikan seperti kearifan lokal perlu diperhatikan dalam hal pembangunan desa. Harus diupayakan untuk mempertahankan keberadaan lembaga adat dengan adanya payung hukum yang lebih tegas dan tidak bertentangan secara yuridis (perangkat peraturan) dengan kelembagaan pemerintahan desa.

Pemberdayaan lembaga adat akan memberi arti pada pemberlakuan *value*, dan dapat diharapkan lebih jauh terinternalisasi pada perilaku masyarakat. Yakni dengan adanya dukungan komunitas pelaku adat. Manakala keberadaan mereka diperkuat pula dengan perangkat peraturan yang berkekuatan yuridis, misalnya dengan lahirnya Peraturan Daerah (perda) yang mengukuhkan keselarasan lembaga adat dengan Pemerintahan Desa (sejalan dengan ketentuan dalam UU No 32. Tahun 2004.), maka dapat diharapkan keberadaan lembaga adat dapat berimplikasi lebih mengikat para pihak terkait untuk melakukan atau melaksanakan tahapan-tahapan aktualitas kearifan lokal ini. Sebagai ilustrasi dapat diperhatikan bahwa ketika konflik dapat diselesaikan pada masa lalu lebih banyak dicapai melalui pertemuan-pertemuan yang intensif antar pemuka adat. Adapun sekarang para pemuka adat tak lagi banyak berperan. Peran tersebut secara hukum telah diambil alih oleh Pemerintahan Desa. Konsekuensinya konflik-konflik yang terjadi penyelesaiannya secara hukum melalui mekanisme lembaga peradilan dan kepolisian.

Lembaga adat sesungguhnya berperan strategis untuk menanamkan nilai kearifan lokal seperti falsafah *piil pesenggiri* kepada warganya. Bahasa yang digunakan komunitas penyangga adat dan lembaga adat, serta berbagai upacara adat yang lazim diselenggarakan, menjadi sesuatu yang paling komunikatif untuk mengaktualisasikan kearifan lokal ini. Keberadaan komunitas yang “eksis” di masyarakat penyangga adat ini berperan dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai *piil pesenggiri*, setidaknya pada komunitas tersebut. Satu hal lain yang mendukung adalah fenomena akulturasi melalui

perkawinan. Banyaknya pernikahan antar-suku atau antar sub-etnis dapat memberikan peluang eksistensi adat-istiadat (termasuk kearifan lokal yang dimaksud penulis) untuk menjadi hal-hal yang dipelajari atau diinternalisasi oleh pasangan-pasangan antar-suku tersebut, ini memberi peluang pengahayatan adat istiadat Lampung oleh masyarakat bukan asli Lampung.

Bahwa pada kenyataannya lembaga adat ini cenderung tidak berdaya dalam sistem hukum pemerintahan desa, terdapat sebuah terobosan untuk mempertahankan eksistensi lembaga adat, semacam mengadakan lembaga adat buatan. Tetapi yang perlu diingat adalah: keberadaannya hanya memerankan diri sebagai forum komunikasi. Program forum ini bersifat mengupayakan pemberdayaan lembaga adat, bukan justeru mengambil alih peran lembaga adat yang ada. Perannya adalah mengkomunikasikan antara lembaga adat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan lembaga adat. Konsep ini menempatkan diri dengan baik dengan tidak berupaya untuk melangkahi lembaga adat, karena hal tersebut akan menghilangkan eksistensi lembaga adat yang baku. Lembaga adat buatan dapat saja dirancang, namun mereka tidak akan representatif mewakili lembaga adat yang baku, yang punya "legitimasi" atau yang sungguhan.

Strategi Redefinisi

Sebagai penutup, dapat dikemukakan disini bahwa mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal dapat ditumbuhkembangkan dengan "menjalankan" strategi berpikir positif *ala* Dr. Ibrahim Elfiky, yakni Strategi Redefinisi (Elfiky, 2009:285). Yakni dengan mencoba mengubah definisi tentang *piil pesenggiri*. Mengubah bukan dalam arti sebenarnya seperti mengubah definisi rumus fisika, namun mengubah cara pandang kita dalam mendefinisikan kearifan lokal tersebut. Perlu definisi ulang tentang cara pandang terhadap nilai-nilai dalam *piil pesenggiri*. Kemudian, berbekal pandangan baru tersebut kita memahami maknanya dengan baik dan mendalam (komprehensif). Termasuk nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya; karena jika dianalisis lebih jauh akan sangat mendukung komunikasi antar-berbagai kelompok masyarakat (yang juga berarti komunikasi antar-budaya pada berbagai *sub-culture* yang ada).

Saat ini, yang diperlukan adalah niat baik, bahwa nilai-nilai itu dapat diredefinisi (sekali lagi, redefinisi pada cara memandangnya) dalam rangka menjalin keharmonisan dan menyelesaikan konflik tanpa perlu tragedi kemanusiaan. Melakukan redefinisi menghendaki kearifan, kedewasaan dan keluasan wawasan: bahwa terdapat nilai dan kepentingan yang lebih besar dibanding yang selama ini dipandang paling benar.

DAFTAR PUSTAKA

Cole, Kris, 2005, *Komunikasi Sebening Kristal; Meraih Kesuksesan Melalui Keterampilan Memahami*, Penerjemah Hari Wahyudi, Penyunting Abdul Rosyid, Penerbit Quantum Bisnis dan Manajemen (PT Mizan Pustaka), Bandung.

Elfiky, Ibrahim, 2009, *Terapi Berpikir Positif; Biarkan Mukjizat Dalam Diri Anda Melesat Agar Hidup Lebih Sukses dan Lebih Bahagia*. Penerbit Zaman, Jakarta.

Jahi, Amri (Ed). 1988. *Komunikasi dan Pembangunan Pedesaan Di Negara-Negara Dunia Ketiga*; Suatu Pengantar. PT Gramedia. Jakarta.

Mardihartono, Agus. 2013, *Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Daerah*. Indepth Publishing. Bandar Lampung.

Wasistono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. PT. Fokusmedia. Bandung.

Sumber lain:

- **Harian Lampug Post**, (Edisi senin 19 November 2012 dan Jumat 23 November 2012)

- **Internet:**

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/10/29/mcmyot-bentrok-an-tarkampung-3-warga-tewas> [download tanggal 29 Desember 2012]

<http://news.liputan6.com/read/473537/Isi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia> [download tanggal 29 Desember 2012]

<http://fachruddindani.blogspot.com/2010/04/kearifan-lokal-daerah-lampung.html>

<http://ulunlampung.blogspot.com/search/label/masalah%20sosial>

<http://www.seruit.com/index.php/budaya>